

- **KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS**
- **DALAM PENGEMBANGAN MUTU SATUAN**
- **PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS**

**Ir. Agus Pranoto Basuki, M.Pd**

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# UNDANG UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah



## Kewenangan Pemerintah Pusat

1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

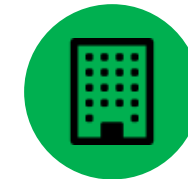


2. Pembinaan dan Pengawasan



## Kewenangan Pemerintah Daerah

**Satuan Pendidikan:** Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar, Sekolah Rumah)



**Program PAUD dan Dikmas:** Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).

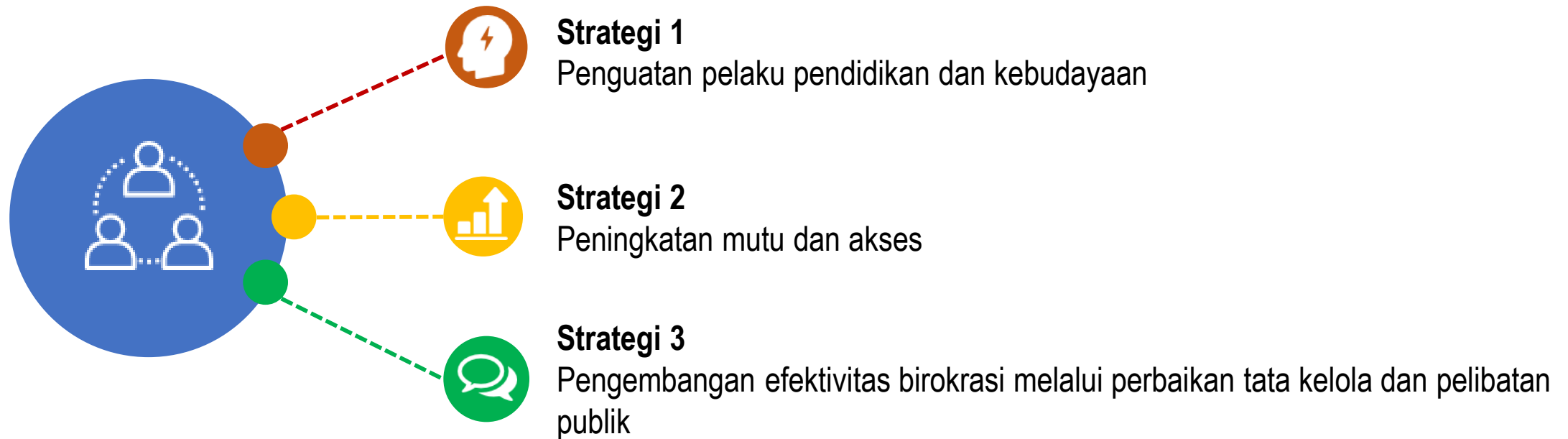


(Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013)

# KERANGKA STRATEGIS MENDIKBUD 2015-2019



Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter berlandaskan gotong-royong.



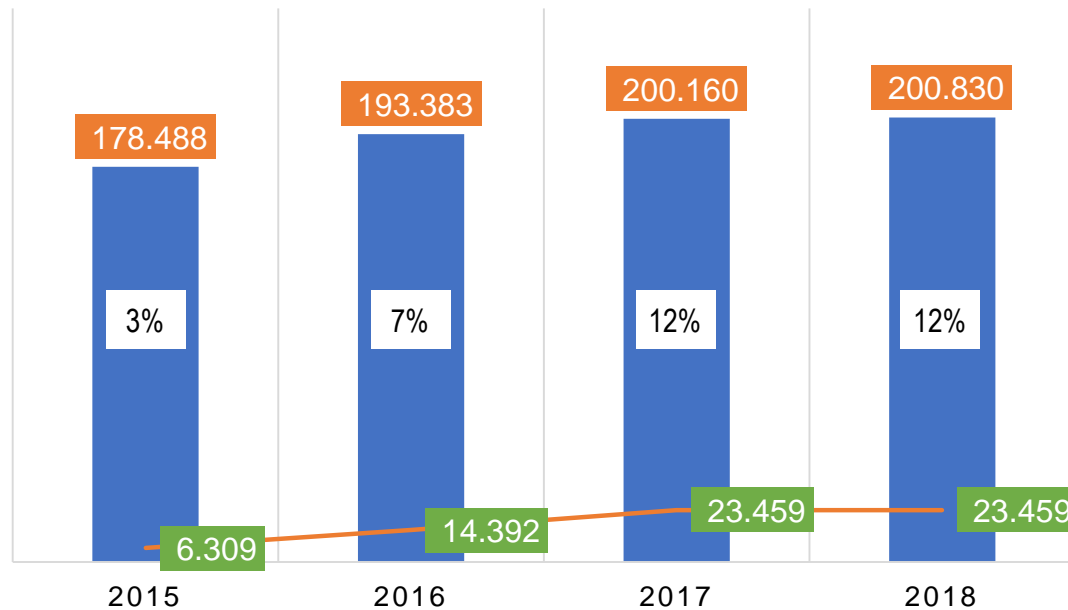
# KEBIJAKAN UMUM DITJEN PAUD DAN DIKMAS 2018



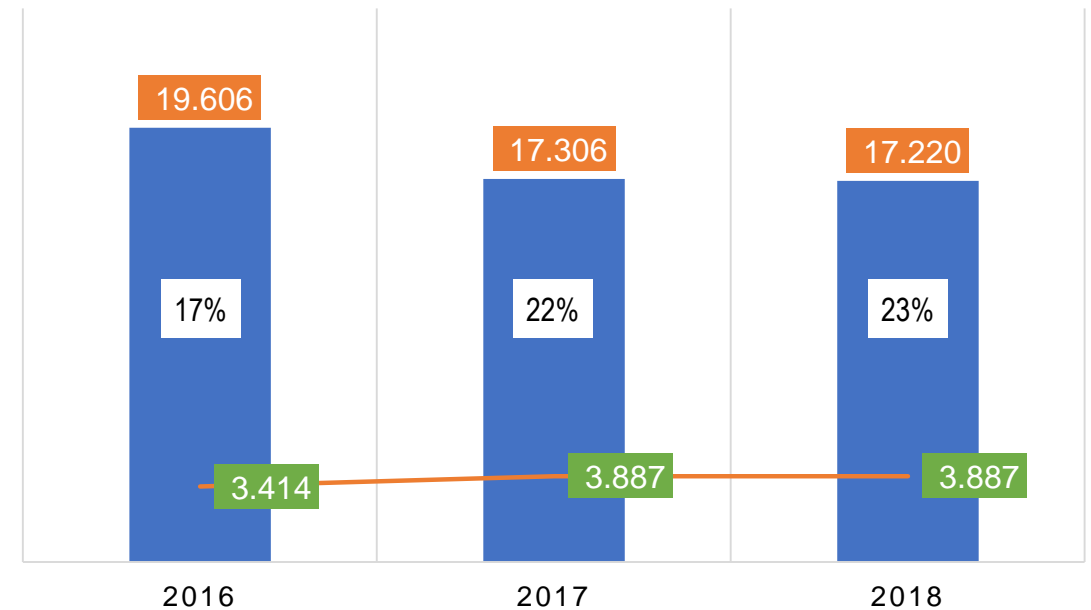
# DATA PERKEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN DAN AKREDITASI 2015 SD. 2018




## PAUD



## LKP

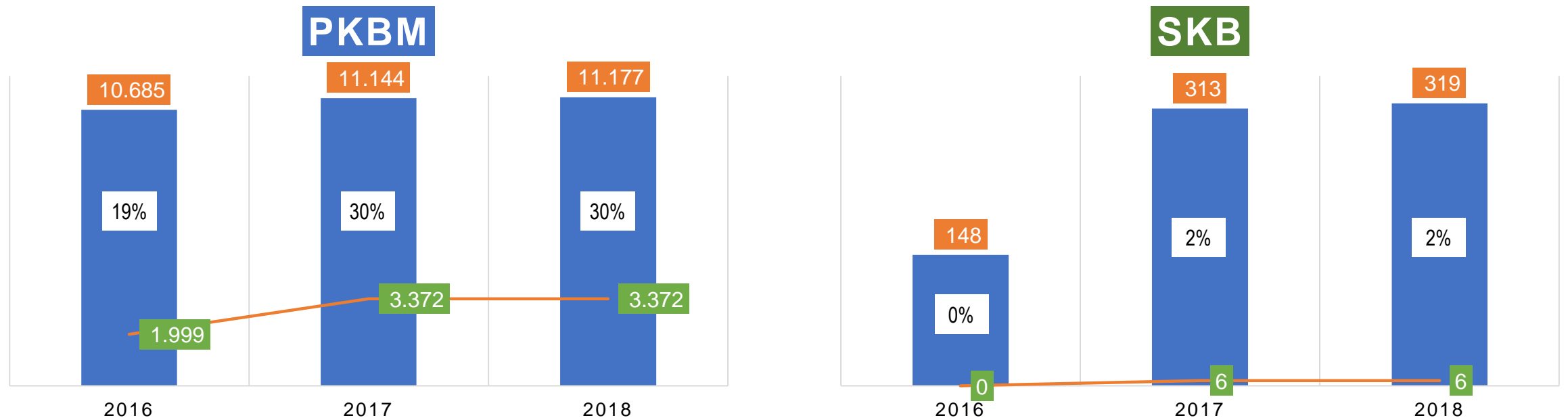


 Jumlah Satuan Pendidikan

 Jumlah Sat. Pendidikan Terakreditasi

 Persentase Sat. Pendidikan Terakreditasi

# DATA PERKEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN DAN AKREDITASI 2015 SD. 2018



■ Jumlah Satuan Pendidikan

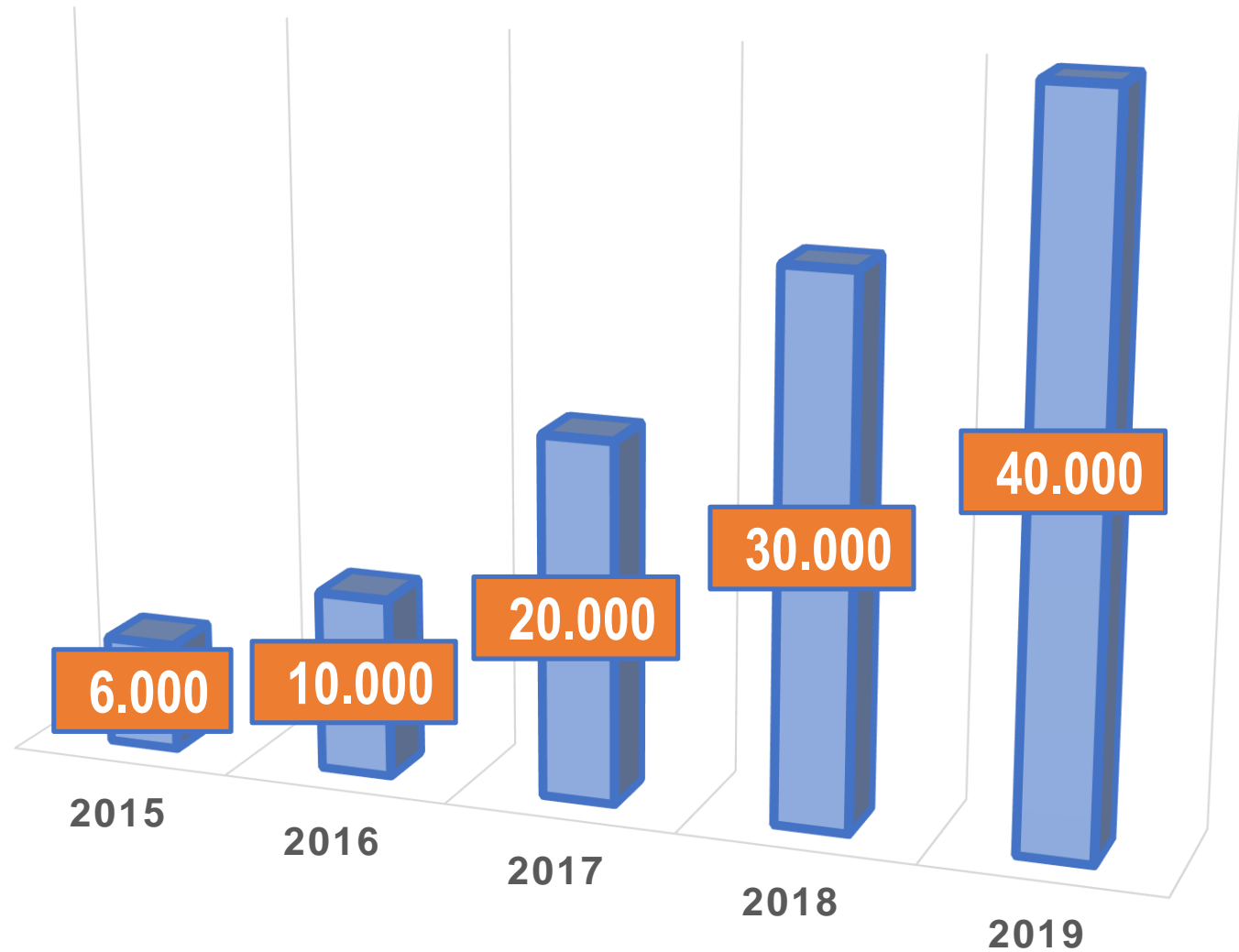
■ Jumlah Sat. Pendidikan Terakreditasi

□ Persentase Sat. Pendidikan Terakreditasi

# TARGET RENSTRA PENGEMBANGAN MUTU



Target Renstra 2017  
PAUD : 5.759 Lembaga  
LKP : 3.500 Lembaga  
PKBM : 995 Lembaga



*“Celaka yang terbesar bukanlah gagal meraih tujuan yang terlalu tinggi, melainkan berhasil mencapai tujuan yang terlalu rendah”.*

- Michel Angelo





# ROAD MAP DJTJEN PAUD DAN DIKMAS UNTUK MENDORONG SATUAN PENDIDIKAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



2015

- Memberikan Prioritas Satuan Paud Dikmas terakreditasi memperoleh dana bantuan
- Sosialisasi Pentingnya Pemenuhan SNP

Dibutuhkan Peran Pemerintah Daerah dan Akreditasi Mandiri Untuk Mencapai Target

2016

- Memperkuat Peran PP dan BP PAUD Dikmas Melakukan Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan
- Mengalokasikan anggaran pengembangan mutu di 8 UPT
- Pengembangan Aplikasi Pemetaan Mutu
- Diklat bagi UPT, Ormit dalam pengembangan mutu satuan Pendidikan
- Melakukan kerjasama dengan Pemda dan Ormit

- Target BAN PAUD dan PNF : 15.000 Satuan Pendidikan
- Kemampuan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 6.567 Satuan Pendidikan

2017

- Menganggarkan kembali anggaran untuk pengembangan mutu di 29 UPT
- Memperkuat kerjasama dengan BAP
- Mengembangkan aplikasi Pembinaan dan verifikasi
- Melaksanakan Ujian di tingkat Satuan Pendidikan bagi yg terakreditasi

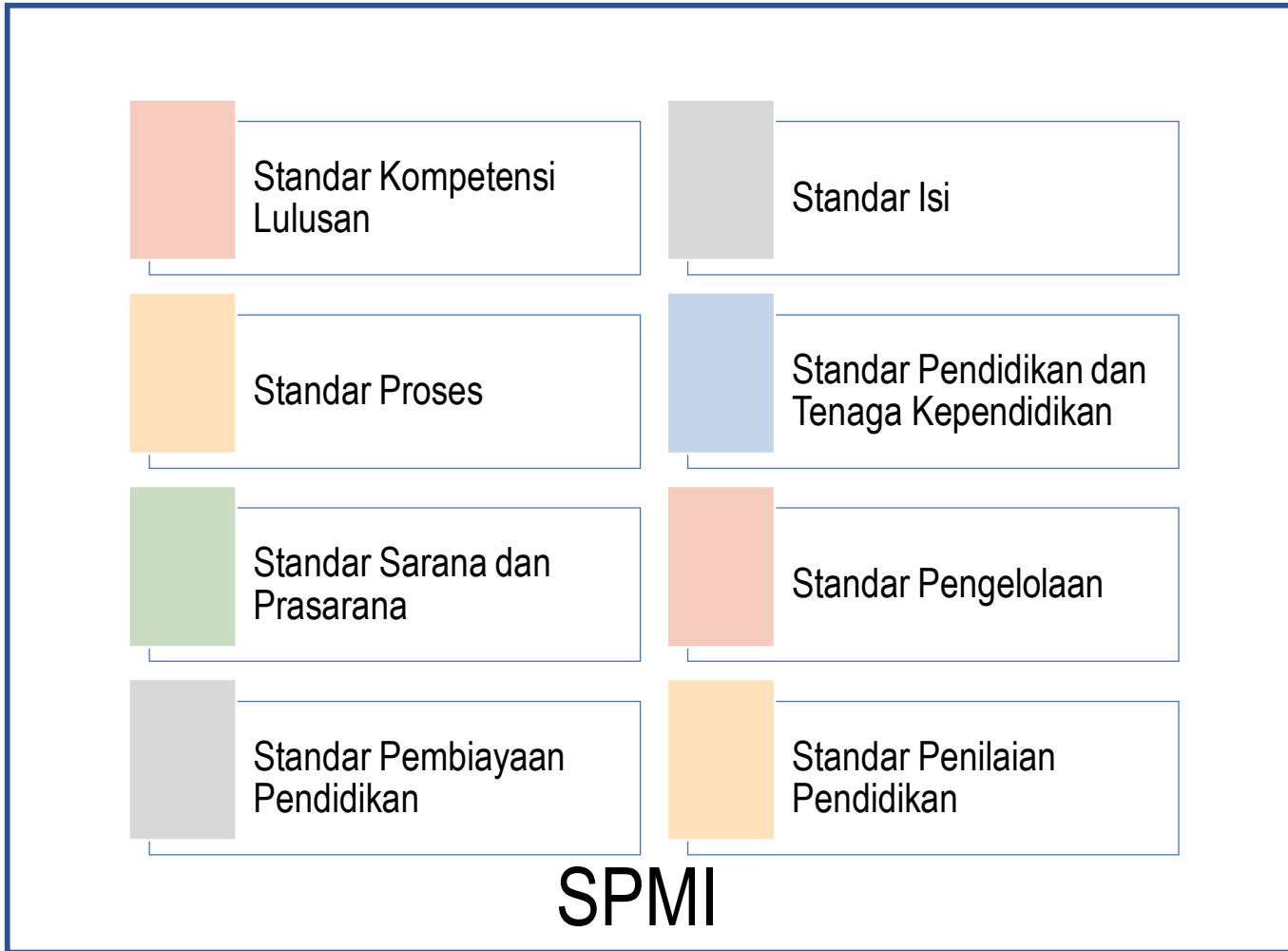
- Target BAN PAUD dan PNF : 20.000 Satuan Pendidikan
- Kemampuan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 7.654 Satuan Pendidikan

2018

- Menganggarkan kembali anggaran untuk pengembangan mutu di 29 UPT
- Menerapkan aplikasi Pemetaan Mutu dari Balitbang
- Melakukan Rakor Pengembangan Mutu antara UPT dan BAP

- Target Ban PAUD dan PNF : 30.000 Satuan Pendidikan
- Kemampuan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 10.000 Satuan Pendidikan

# EVALUASI DIRI



SPME

SPMI – Sistem Penjaminan Mutu Internal  
– Evaluasi diri dilakukan oleh Satuan Pendidikan, didampingi oleh Balai Pengembangan PAUD & Dikmas dan Dinas Pendidikan.

SPME – Sistem Pengembangan Mutu Eksternal – dilakukan oleh BAN PAUD & PNF.

# PEMBINAAN MUTU



1. PP dan BP PAUD Dikmas bekerjasama dengan Pemda membina SP untuk memenuhi SNP
2. Meningkatkan anggaran pencapaian SNP
3. Mensinergikan kegiatan Satker dengan hasil pemetaan mutu
4. Prioritas Bansos bagi SP terakreditasi
5. Koordinasi dengan organisasi mitra

# DAFTAR TARGET PEMBINAAN SATUAN PAUD DIKMAS MENCAPAI SNP



---

	Target 2017	Target 2018
BAN PAUD & PNF	-	30.275
Ditjen PAUD dan Dikmas	7.654	12.439
Dinas Pendidikan	?	?
Mandiri	?	?

---

# KESIMPULAN



1. Kesadaran mutu masih sangat rendah
2. Instrumen insentif terbatas
3. Keberpihakan pada pendidikan nonformal dan informal masih rendah
4. Pembinaan kabupaten/kota masih kurang
5. Dukungan APBN dan APBD terbatas
6. Kualitas dan kuantitas pamong/penilik masih rendah
7. Target Renstra terlalu rendah

# Terima Kasih

